

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berbagi Pengalaman Membentuk BPBD di Daerah Percontohan

### LATAR BELAKANG

Undang Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen Indonesia terhadap *Hyogo Framework for Action (2005)* setelah Tsunami Aceh.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46/2008, Keputusan Presiden No. 41/2007, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3/2008, tugas penanggulangan bencana diatur di dalam tiga divisi di BNPB dan BPBD: 1) Kesiapsiagaan, 2) Tanggap Darurat, serta 3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Unit pendukung dalam lembaga tersebut adalah Divisi Logistik dan Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS). PUSDALOPS memainkan peran utama sebelum, selama, dan sesudah bencana. Perannya dalam peringatan dini tsunami adalah menerima peringatan, menentukan respon yang tepat, dan menyebarkan peringatan serta arahan ke masyarakat berisiko.

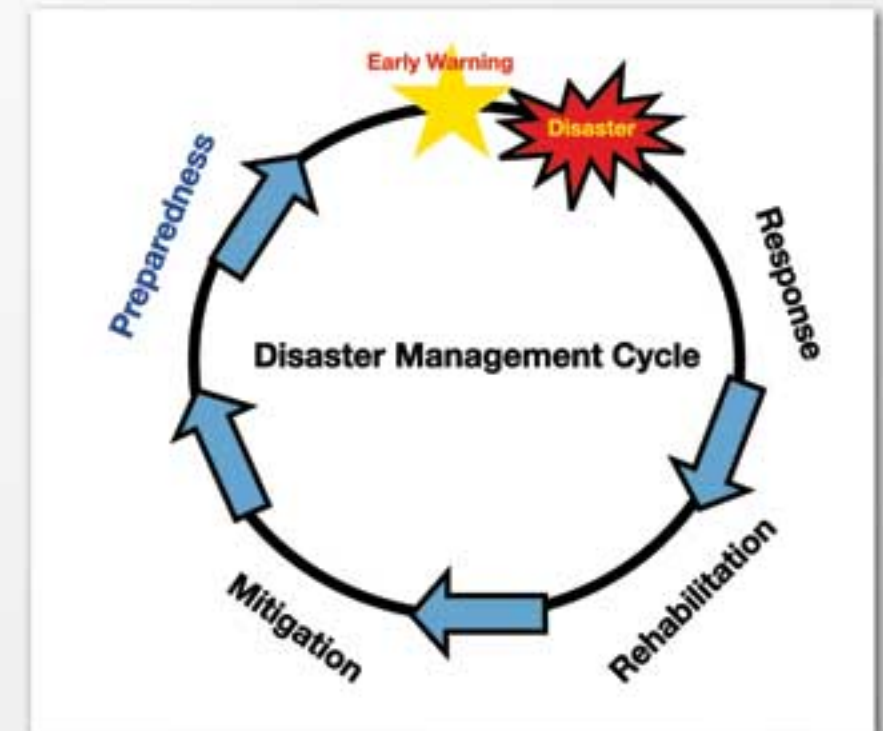
Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah. Pemerintah pusat menyarankan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) dan BNPB. Hingga saat ini, sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya.

### TANTANGAN

Berdirinya beberapa BPBD mengindikasikan komitmen untuk memperbaiki penanggulangan bencana. Kendati demikian, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana masih merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Kurangnya petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah mengenai pembentukan badan tersebut menghambat pembentukan struktur lembaga yang kokoh dan kinerja lembaga yang baik. Kesulitan utama terletak pada keterbatasan pengembangan sumber daya manusia, misalnya kebutuhan personel yang terampil, perencanaan dan alokasi anggaran. Banyak Kabupaten dan Kota masih ragu-ragu membentuk BPBD, karena sifatnya yang tidak wajib.

### PERKEMBANGAN DI DAERAH PERCONTOHAN

Kota Padang, Provinsi Bali, dan beberapa kabupaten di Jawa merespon pendirian BPBD dengan berbeda-beda.



Siklus Manajemen Bencana



BPBD Padang



PUSDALOPS Padang



Peresmian PUSDALOPS oleh Gubernur Bali



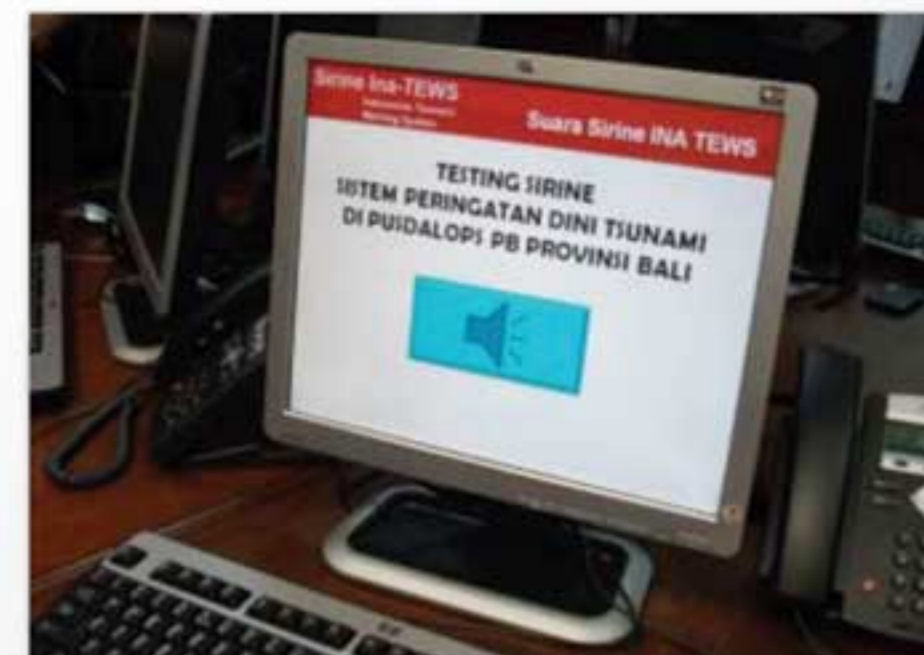
Tahun 2007, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang membentuk tim dari perwakilan lembaga pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membuat Rencana Kesiapsiagaan Bencana dan Rencana Strategis (Renstra) Kota Padang. Masukan tim diserahkan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan tahun 2008. Perda ini diikuti dengan pendirian BPBD Kota Padang yang efektif bekerja pada Januari 2009. Tantangan utama yang dihadapi BPBD adalah kebutuhan personel terampil dan pengembangan sumber daya manusia. BPBD telah mengoperasikan PUSDALOPS, dengan fasilitas dan peralatan sederhana, yang berfungsi sebagai pusat peringatan dini tsunami daerah.

Provinsi Bali kini memiliki BPBD, walaupun hanya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur. Dalam waktu dekat BPBD akan disahkan melalui Perda. Tugas penanggulangan bencana secara bertahap dialihkan dari lembaga pendahulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), ke BPBD. BPBD tingkat kabupaten/kota didirikan di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem. PUSDALOPS provinsi yang memiliki peralatan lengkap telah beroperasi sejak tahun 2009 dengan dukungan dari Pemerintah Perancis. PUSDALOPS menyediakan layanan peringatan dini tsunami dan tanggap darurat di seluruh kabupaten di Bali. Walaupun semua peralatan dan personel, secara jumlah dan kualitas mencukupi, PUSDALOPS masih berusaha mencapai performa yang memadai.

Pada tahun 2008, diantara 5 kabupaten di Jawa, hanya Cilacap dan Ciamis yang telah mendirikan BPBD. Sejak akhir 2009, Bantul telah bersiap memenuhi prasyarat teknis dan dasar hukum untuk mendirikan BPBD yang diharapkan berfungsi akhir 2010. PUSDALOPS Bantul yang telah beroperasi dibawah Badan Kesbanglinmas sejak 2008 akan menjadi bagian dari BPBD. Di Kebumen, PUSDALOPS berlokasi di rumah dinas Bupati dan telah beroperasi sejak 2009. Hingga kini, Kabupaten Purworejo dan Kebumen masih bergantung pada Badan Kesbanglinmas untuk penanggulangan bencana. Keduanya memiliki alasan tersendiri tidak mendirikan BPBD.

## GAMBARAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling rawan bencana. Dampak banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa, dan tsunami pada kehidupan manusia dan perekonomian dirasakan lintas negara. Walaupun demikian, perubahan paradigma mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, baik secara kelembagaan maupun dalam lingkup umum, sedang berlangsung dan prosesnya memakan waktu. Dorongan diberikan untuk pendirian BPBD Provinsi, padahal BPBD di tingkat kabupaten dan kota juga memegang peran penting dalam proses peralihan ini, karena kedekatannya dengan masalah dan masyarakat. BPBD akan berhasil bila mendapat petunjuk dan dukungan berupa komitmen politik dan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.



PUSDALOPS Bali



Meja Tsunami di PUSDALOPS Bali



BPBD Ciamis



BPBD Cilacap

### Penulis:

Willy Wicaksono  
willy.wicaksono@gtz.de  
Benny Usdianto  
benusd@hotmail.com  
Michael Hoppe  
michael.hoppe@gtz.de

### Diterbitkan oleh:

Deutsche  
Gesellschaft für  
Technische  
Zusammenarbeit  
(GTZ) GmbH

### Foto & grafik:

© GTZ IS-GITEWS

GTZ Office Jakarta  
Menara BCA 46th Floor  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
T: +62-21-2358 7111  
F: +62-21-2358 7110  
E: gtz-indonesien@gtz.de  
I: www.gtz.de/indonesia

### Informasi lebih lanjut:

www.gitews.org/tsunami-kit  
BPBD Padang: bpbdd.padang@gmail.com  
BPBD Denpasar / Bali:  
penanggulanganbencana@denpasar.go.id  
BPBD Cilacap: +62 282 533520  
BPBD Ciamis: +62 265 773904  
GITEWS: www.gitews.org